

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PDRB PERKAPITA, PENGANGGURAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 1999-2013

SATRIANI S



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PDRB PERKAPITA, PENGANGGURAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 1999-2013

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

SATRIANI S

A11109306



Kepada

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PDRB PERKAPITA, PENGANGGURAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 1999-2013

disusun dan diajukan oleh

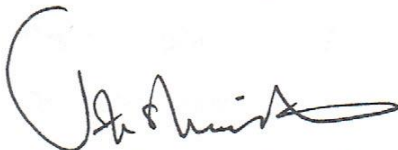
SATRIANI S

A11109306

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ujikan

Makassar, 27 November 2015

Pembimbing I



Drs.H. Taslim Arifin, MA

NIP 19520828 198003 1 006

Pembimbing II



Drs. Hamrullah. SE., M.Si

NIP 19681221 199512 1 001

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi

Universitas Hasanuddin



Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA, Ph.D.

NIP 19610806 198903 1 004

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PDRB PERKAPITA, PENGANGGURAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 1999-2013

Disusun dan diajukan oleh

SATRIANI S

A11109306

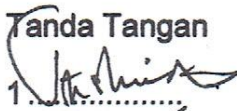




telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

pada tanggal **7 Juni 2016** dan

dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1 Drs. H. Taslim Arifin, MA.	Ketua	1..... 
2 Drs. Hamrullah, SE., M.Si.	Sekretaris	2..... 
3 Dr. H. Agussalim, SE., M.Si.	Anggota	3..... 
4 Drs. Muh. Yusri Zamhuri, MA. Ph.D.	Anggota	4..... 
5 Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si	Anggota	5..... 

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi

Universitas Hasanuddin



Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA, Ph.D.

NIP 19610806 198903 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SATRIANI S

NIM : A11109306

Jurusan/program studi : ILMU EKONOMI/STRATA SATU (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS PENGARUH PDRB PERKAPITA, PENGANGGURAN DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN PERIODE 1999-2013**

adalah karya ilmiah saya sendiri dengan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur ciplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 5 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 07 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,



SATRIANI S

PRAKATA



Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dan kemuliaan yang agung penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, atas Rahmat, Anugerah dan Perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul —”**Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1999-2013**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selama menempuh perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, peneliti sudah sangat banyak memperoleh motivasi, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan diiringi rasa hormat yang mendalam, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE., MS.Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, terima kasih atas segala bantuan dan nasihat yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Ekonomi.

3. Drs. H. Taslim Arifin, MA selaku penasehat akademik sekaligus pembimbing I dan Drs. Hamrullah, SE., M.Si selaku Pembimbing II yang tak bosan-bosannya memberi arahan, bimbingan serta meluangkan waktunya yang begitu berharga kepada penulis selama penulisan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat besar kepada penulis selama perkuliahan.
5. Kepada bapak dan ibu pegawai akademik yang banyak membantu dalam pengurusan administrasi.
6. Kepada Badan Pusat Statistik Kota Makassar yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
7. Terima kasih yang sebesar besarnya kepada saudara-saudari **SPARTANS 09** yang telah memberikan banyak bantuan, doa dan dukungan. Sukses untuk kita semua.
8. Terima kasih banyak Mughni Latifah, SE yang selalu siap membantu kapanpun, thank's sayy, Juwani Pratiwi Utami, SE dan Alm. Andi Fatimah Aminuddin, SE. Terima kasih banyak atas semuanya.
9. Buat teman-teman KKN Gelombang 85 khususnya posko Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar kak Romi, Wandu, Gaby, Ratih dan Sepsrianty.

10. Untuk keluarga besar khususnya kedua orang tua tercinta, terima kasih yang tak terhingga telah mendidik dan membesarkan penulis dengan sebaik-baiknya, terima kasih atas dukungan dan semangat yang tak henti-hentinya selama ini.
11. Dan buat pihak-pihak lain yang mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu per satu dalam skripsi ini, saya ucapkan terima kasih banyak.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, sehingga penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 07 Juni 2016

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PDRB PERKAPITA, PENGANGGURAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 1999-2013

Satriani S

H Taslim Arifin

Hamrullah

Penelitian ini diberi judul "*Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1999-2013*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari tahun 1999-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Kata Kunci : Kemiskinan, PDRB Perkapita, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GDP PERCAPITA, UNEMPLOYMENT AND HUMAN DEVELOPMENT INDEKS ON POVERTY IN THE PROVINCE SOUTH SULAWESI PERIOD 1999-2013

Satriani S

H Taslim Arifin

Hamrullah

This study entitled "Analysis of Effect of the GDP per capita, unemployment, and the Human Development Index Against Poverty in South Sulawesi Province Period 1999-2013". The objective of this study was to analyze the factors that affect poverty in the province of South Sulawesi. Testing the hypothesis using analysis linear regression. The data used in this research is time series data from the years 1999-2013. The results showed that the GDP per capita significant and negative effect on poverty, unemployment no significant and negative effect on poverty and human development index negative and not significantly to poverty.

Keyword : Poverty, GDP Percapita, Unemployment and Human Development Indeks (HDI)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Konsep Kemiskinan	9
2.1.2 Ukuran Kemiskinan.....	12
2.1.3 Penyebab Kemiskinan	13
2.1.4 PDRB Perkapita.....	15
2.1.5 Pengangguran	16
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia.....	20
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	22
2.2.1 Pengaruh PDRB Perkapita terhadap Kemiskinan	22
2.2.2 Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan.....	24

2.2.3 Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan	25
2.3 Tinjauan Empiris	27
2.4 Kerangka Pikir	28
2.5 Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	30
3.2 Variabel Penelitian	30
3.3 Jenis dan Sumber Data	30
3.4 Metode Pengumpulan Data	30
3.5 Metode Analisis	31
3.6 Uji Statistik.....	32
3.6.1 Uji Signifikansi Parameter (Uji t)	32
3.6.2 Koefisien Determinasi (R ²)	33
3.6.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	33
3.6.4 Uji Asumsi Klasik	34
3.6.4.1 Deteksi Normalitas	35
3.6.4.2 Deteksi Multikolineritas	35
3.6.4.3 Deteksi Autokorelasi	36
3.6.4.4 Deteksi Heterokedastisitas.....	36
3.7 Definisi Operasional Variabel.....	37
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.1.1 Kondisi Geografis	39
4.1.2 Kondisi Demografis.....	40
4.2 Perkembangan Variabel Penelitian	42
4.2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan	42
4.2.2 Perkembangan PDRB Perkapita.....	44
4.2.3 Perkembangan Pengangguran	46
4.2.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia.....	48
4.3 Analisis Data	49

4.3.1 Uji Statistik	50
4.3.1.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	50
4.3.1.2 Uji F (Simultan).....	50
4.3.1.3 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)	51
4.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	53
4.3.2.1 Uji Normalitas	53
4.3.2.2 Uji Multikolineritas.....	54
4.3.2.3 Uji Autokorelasi.....	55
4.3.2.4 Uji Heterokedastisitas	56
4.3.3 Uji Analisis Regresi Berganda	56
4.4 Pembahasan.....	58
4.4.1 Pengaruh PDRB Perkapita Terhadap Kemiskinan	58
4.4.2 Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan.....	58
4.4.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan	60
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan	41
Tabel 4.2	jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Selatan Tahun 1999-2013	43
Tabel 4.3	PDRB Perkapita Atas Harga Konstan Sulawesi Selatan Tahun 1999-2013	45
Tabel 4.4	Tabel Uji F	51
Tabel 4.5	Tabel Uji t	52
Tabel 4.6	Tabel Uji Multikolineritas	55
Tabel 4.7	Tabel Hasil Regresi Linear Berganda Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perbandingan Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional	6
Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian	29
Gambar 4.1	Grafik Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1999-2013.....	47
Gambar 4.2	Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk mencapai dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. seseorang dikatakan miskin bila dia belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan. Semua ukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen yaitu, pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya dan kedua, jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagian pertama relatif jelas. Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat harga-harga makanan yang menjadi menu makanan golongan kaum miskin. Adapun elemen kedua sifatnya lebih subjektif (Kuncoro dalam Ravi Dwi, 2010).

Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertimbangan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Simatupang dan Saktyanu K, 2003).

Pada awal tahun 1970, para ahli ekonomi mulai meragukan manfaat pertumbuhan pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi sebab di banyak negara yang sedang berkembang terdapat adanya gejala kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan, dan pengangguran yang cenderung meningkat walaupun pendapatan nasional mengalami peningkatan secara stabil. Oleh sebab itu, mulai awal tahun 1970 muncul pendapat bahwa apabila pembangunan tidak disertai pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada penduduk miskin, maka mustahil akan memberikan hasil yang optimal (Tambunan dalam Dian Octaviani, 2001).

Meningkatkan kinerja perekonomian merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008).

Kemiskinan merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan lokasi lingkungan.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (Sukmaraga, 2011).

Kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) dari Nurkse 1953. Yang dimaksud lingkaran setan kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya (Kuncoro, 1997).

Setiap upaya pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat sehingga kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat meningkat. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan umum/rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan (Rejeki, 2006).

Pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral (Sukmaraga, 2011).

Terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Pertama, pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin. Kedua, pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. Ketiga, pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisor terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian (Soegijoko, 1997).

Semakin tinggi jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah akan menjadi tinggi beban pembangunan. Oleh sebab itu pembangunan dikatakan berhasil bila jumlah dan persentase penduduk miskin akan semakin sedikit. Untuk itu pemerintah dengan berbagai program berupaya menanggulangi kemiskinan, namun disadari bahwa pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil maksimal dan belum sesuai dengan harapan. Kompleksnya masalah kemiskinan disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi terciptanya kemiskinan. Sebagai masalah yang bersifat multidimensional, kemiskinan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga upaya untuk memecahkan masalah kemiskinan tidaklah

mudah. Banyak faktor yang ditenggarai berpengaruh besar terhadap kondisi kemiskinan (BPS, 2009).

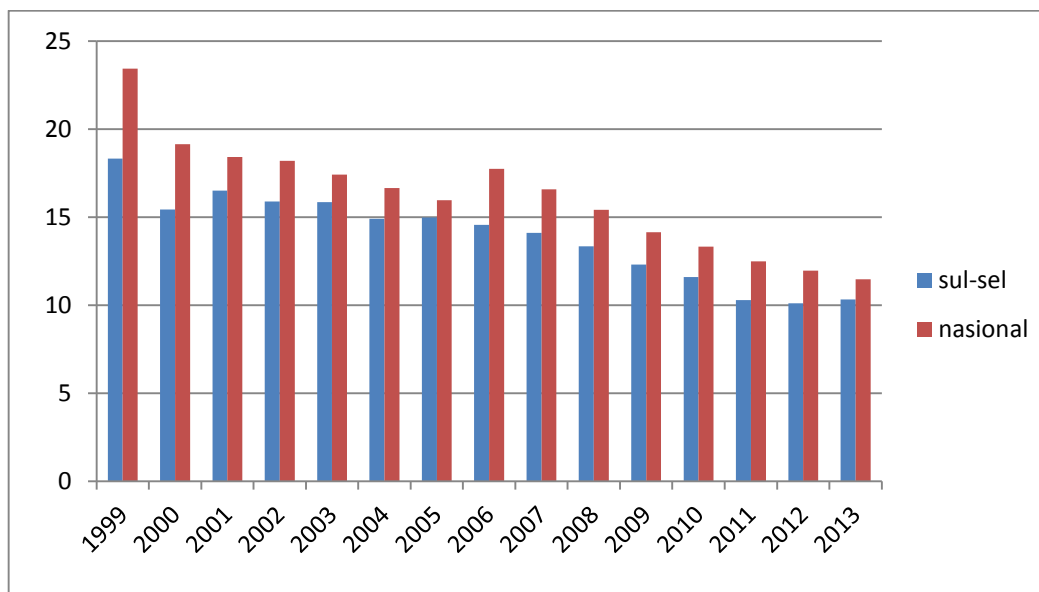
Masalah kemiskinan di Indonesia cukup rumit karena luas wilayah, beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat, dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Selain itu, masalah kemiskinan juga bersifat multidimensional karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, tetapi juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin, kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (Agussalim, 2009).

Apabila mengacu pada data BPS, tampak jelas bahwa baik jumlah maupun persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan secara konsisten. Membaiknya kinerja ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat inflasi, serta meningkatnya nilai tukar petani (NTP) telah berkontribusi besar terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan. Faktanya adalah pembengkakan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan dikontribusi oleh wilayah perdesaan. Berbeda kontras dengan wilayah perkotaan yang mengalami penurunan baik jumlah maupun persentase penduduk miskin, wilayah perdesaan justru menunjukkan peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin. Akibatnya, proporsi penduduk miskin di perdesaan cenderung semakin membesar. Secara implisit fakta ini menegaskan bahwa penduduk miskin di wilayah perdesaan tidak memperoleh manfaat dari kemajuan ekonomi yang dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan (Agussalim, 2012).

Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan di pemerintahan pusat (problem nasional), yakni masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan provinsi lain meskipun

secara signifikan mengalami penurunan. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Gambar 1.1 Perbandingan Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan melihat gambar 1.1 dapat dikatakan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung menurun setiap tahunnya, dari tahun 1999 sebesar 18,32 persen hingga tahun 2013 sebesar 10,32 persen. Akan tetapi kemiskinan nasional masih lebih tinggi dibandingkan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga pada tahun 2013 angka kemiskinan di Sulawesi Selatan mencapai 10,32 persen sedangkan angka kemiskinan nasional sebesar 11,47 persen. Dengan adanya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan yang berfluktuatif dari tahun ke tahun tetapi cenderung mengalami trend positif yang berarti jumlah PDRB meningkat dibarengi menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi

Selatan, yang diikuti dengan peningkatan laju indeks pembangunan manusia juga dapat meningkat secara signifikan serta penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi sulsel pada tahun 2013 cukup tinggi dan rata-rata diatas angka pertumbuhan nasional, walaupun disaat yang bersamaan kebijakan pemerintah dalam rangka menaikkan harga bbm sebagai konsekuensi menurunkan subsidi BBM, angka kemiskinan naik hingga 10,32% dari jumlah penduduk Sulawesi Selatan hingga september 2013. Salah satu bukti kesungguhan pemerintah provinsi dalam menyikapi program pemberantasan kemiskinan yakni dengan ditetapkannya perda Nomor 3 tahun 2012 tentang penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia. Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu (Sumodiningrat, 1998).

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga penulis tertarik untuk menulis sebuah penelitian skripsi yang berjudul: **“Analisis Pengaruh PDRB**

Perkapita, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1999-2013”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh PDRB Perkapita, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 1999-2013.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian serta bertolak pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel PDRB perkapita, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 1999-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang menyangkut masalah kemiskinan.
2. Penelitian ini memberikan pengetahuan baru serta menambah informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.
3. Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya terkait dengan masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara (www.wikipedia.com).

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*) dan keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis (Suryawati, 2005).

Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara berkembang bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar negara berkembang. Persoalannya sama namun dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan di negara maju merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka tetapi bagi negara

berkembang persoalan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk. Bahkan ada negara-negara sangat miskin mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi dua pertiga dari penduduknya (Booth dan Sundrum, 1987).

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi yaitu kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan.

Pola kemiskinan ada empat yaitu, pola pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Djojohadikusumo, 1995).

Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (World Bank, 2004). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk

yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2015).

Menurut Bappenas, kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi (Bappenas, 2004).

Masalah kemiskinan dapat ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (antara lain angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan dan ekonomi (konsumsi per kapita). Kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik sosial, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hal dasar masyarakat miskin, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain, pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan pendapatan, pendekatan kemampuan dasar, dan pendekatan objektif dan subjektif (Bappenas, 2004).

2.1.2 Ukuran Kemiskinan

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2.100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2.100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin. Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD \$2 per orang per hari (World Bank, 2010).

Ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran di dasarkan konsumsi (*consumption based poverty line*). Oleh sebab itu, garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya serta jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari (Kuncoro, 1997).

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse, secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan

kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat atau negara sedangkan kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya daripada lingkungan yang berasal dari orang tersebut. Dengan kata lain, walaupun pendapatan yang diperoleh sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin (Nurkse dalam Lincoln Arsyad, 1999).

2.1.3 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik ini, yaitu tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat, pendapatan perkapita negara-negara dunia ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi, distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata, mayoritas penduduk di negara-negara dunia ketiga harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut, fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga kematian bayi di negara-negara dunia ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di negara maju serta fasilitas pendidikan dikebanyakan negara-negara berkembang isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut Sharp, terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya

yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul karena adanya perbedaan akses dalam modal (Kuncoro, 2006).

Penyebab dasar kemiskinan adalah kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal, terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana, kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor, adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung, adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antar sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern), rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat, budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya, tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance), pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan (World Bank, 2003).

2.1.4 PDRB Perkapita

Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu (Kuncoro, 2004).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 1993. Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sukirno, 2005).

Angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu, pertama menurut pendekatan produksi, dalam pendekatan produksi produk domestik regional bruto adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang

dipakai dalam proses produksi. Kedua, menurut pendekatan pendapatan dimana dalam pendekatan pendapatan nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada sektor jasa, tetapi tidak dibayar setara harga pasar, misalnya sektor pemerintahan. Hal ini disebabkan kurang lengkapnya data dan tidak adanya metode yang akurat yang dapat dipakai dalam mengukur nilai produksi dan biaya antara dari berbagai kegiatan jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya. Ketiga, menurut pendekatan pengeluaran, pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok dan ekspor neto (Tarigan, 2005).

2.1.5 Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama. Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (part time)

selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin (Arsyad, 1997).

Pengangguran yang tinggi termasuk kedalam masalah ekonomi dan masalah sosial. Pengangguran merupakan masalah ekonomi karena ketika angka pengangguran meningkat, sebagai dampaknya suatu negara membuang barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran. Pengangguran juga merupakan masalah sosial yang besar karena mengakibatkan penderitaan yang besar untuk pekerja yang menganggur yang harus berjuang dengan pendapatan yang berkurang. Biaya ekonomi dari pengangguran jelas besar, namun tidak ada jumlah mata uang yang dapat mengungkapkan secara tepat tentang korban psikologi dan manusia pada saat mereka menganggur (Samuelson, 2008).

Berdasarkan lama waktu kerja, pengangguran dibagi ke dalam empat kelompok yaitu, pengangguran terbuka yang tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja. Pengangguran tersembunyi yaitu terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Pengangguran bermusim terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan, yang disebabkan oleh perubahan permintaan terhadap tenaga kerja yang sifatnya berkala. Setengah menganggur (*underemployed*) yaitu terjadi bila tenaga kerja tidak bekerja secara optimum (kurang dari 35 jam

seminggu atau bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu) dimana produktivitasnya/pendapatannya rendah (Sukirno, 2008).

Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat diantara tingkat pendapatan nasional yang dicapai (GDP) dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan, semakin tinggi pendapatan nasional (GDP), semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian (Sukirno, 1994).

Pengangguran akan muncul dalam suatu perekonomian disebabkan oleh tiga hal. Pertama, proses mencari kerja, pada proses ini menyediakan penjelasan teoritis yang penting bagi tingkat pengangguran. Munculnya angkatan kerja baru akan menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. Dalam proses ini terdapat hambatan dalam mencari kerja yaitu disebabkan karena adanya para pekerja yang ingin pindah ke pekerjaan lain, tidak sempurnanya informasi yang diterima pencari kerja mengenai lapangan kerja yang tersedia, serta informasi yang tidak sempurna pada besarnya tingkat upah yang layak mereka terima dan sebagainya. Kedua kekakuan upah, besarnya pengangguran yang terjadi dipengaruhi juga oleh tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja. Penurunan pada proses produksi dalam perekonomian akan mengakibatkan pergeseran atau penurunan pada permintaan tenaga kerja, akibatnya akan terjadi penurunan

besarnya upah yang ditetapkan. Dengan adanya kekakuan upah dalam jangka pendek, tingkat upah akan mengalami kenaikan pada tingkat upah semula. Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran (*excess supply*) pada tenaga kerja sebagai inflasi dari adanya tingkat pengangguran akibat kekakuan upah yang terjadi. Ketiga efisiensi upah, besarnya pengangguran juga dipengaruhi oleh efisiensi pada teori pengupahan. Efisiensi yang terjadi pada fungsi tingkat upah tersebut terjadi karena semakin tinggi perusahaan membayar upah maka akan semakin keras usaha para pekerja untuk bekerja walaupun akan muncul juga kondisi dimana terjadi *diminishing rate*. Hal ini justru akan memberikan konsekuensi yang buruk jika perusahaan memilih membayar lebih pada tenaga kerja yang memiliki efisiensi lebih tinggi maka akan terjadi pengangguran terpaksa akibat dari persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan (Kaufman dan Hotckiss, 1999).

Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha untuk mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka. Aspirasi mereka biasanya bekerja di sektor modern atau di kantor. Untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka bersedia untuk menunggu beberapa lama. Tidak menutup kemungkinan mereka berusaha mencari pekerjaan di kota, provinsi atau di daerah yang kegiatan industrinya telah berkembang. Ini yang menyebabkan angka pengangguran terbuka cenderung tinggi di kota atau daerah tersebut. Sebaliknya, angka pengangguran terbuka rendah di daerah atau provinsi yang kegiatan ekonominya masih tertumpu pada sektor tradisional, terlebih jika tingkat pendidikan di daerah itu masih rendah (Mudjadrat, 2006).

Menurut Edgar O. Edwards, untuk mengelompokkan masing-masing pengangguran perlu diperhatikan dimensi-dimensi sebagai berikut, waktu

(banyak diantara mereka yang bekerja ingin bekerja lebih lama, misal jam kerjanya per hari, per minggu, atau per bulan), intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan), produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumberdaya-sumberdaya komplementer untuk melakukan pekerjaan) (Arsyad, 1999).

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujudkan, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai dan dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2004).

Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Keadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sukirno, 2004).

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif. IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut

adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir, pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas, dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging people's choice*), dalam konsep ini penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia. Pemerataan, penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Kestinambungan, akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia dan lingkungan selalu diperbaharui. Pemberdayaan, penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arrah) kehidupan mereka, serta untuk

berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan (UNDP, 1995).

Secara khusus, indeks pembangunan manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Kemiskinan

Pendapatan per kapita seringkali digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (ability to pay) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi penerimaan daerah tersebut. Tingginya penerimaan daerah, diharapkan nantinya pemerintah daerah tersebut dapat mengatasi masalah kemiskinan dengan baik. Tingginya tingkat pendapatan daerah bisa disebabkan karena berbagai perubahan mendasar, seperti struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional. Seluruh negara di dunia telah sepakat bahwa produk nasional bruto per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu bangsa (Arsyad, 1999).

Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pada pertumbuhan penduduk. Pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang (Sukirno, 2000).

Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara dan juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara (Arsyad, 1999). Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah (Thamrin, 2000).

Menurut Kuznet, pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Selanjutnya menurut penelitian Deni Tisna (2008) menyatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Tambunan, 2001).

2.2.2 Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali, jika suatu masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan atau kesejahteraannya tinggi, namun didalam masyarakat ada juga yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran secara otomatis akan mengurangi kesejahteraan suatu masyarakat yang secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sukirno, 2010).

Bagi sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintahan dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya, karena kadang kala ada juga pekerja diperkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang yang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum

tentu miskin. Sama juga halnya adalah banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh perhari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka masih tetap miskin (Arsyad, 1997).

2.2.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Disektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

Indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup

panjang umur (*longevity*) dan hidup sehat (*healty life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan (Mulyaningsih, 2008).

Dalam rangka peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan manusia dapat dicermati dari besar kecilnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Apabila IPM mengalami peningkatan, maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, pada gilirannya penduduk miskin menjadi semakin berkurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya (Widodo dkk, 2011).

Manusia merupakan tujuan utama pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2000).

Pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk yang tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu meningkatkan produktivitas dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan (Lanjouw, dkk, 2001).

2.3 Tinjauan Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Deny Tisna Amijaya (2008) dengan judul “Pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004”. Tulisannya meneliti tentang pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia, dalam hal ini untuk seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2003-2004. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode panel data. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Dian Octaviani (2001) dengan judul “inflasi, pengangguran, dan kemiskinan di Indonesia: analisis indeks Forrester Greer & Horbecke”. Tulisannya menganalisis tentang pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri yang dikemukakan oleh Culter dan Kats (1991). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan angka pengangguran mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan. Sebaliknya semakin kecil angka pengangguran akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Ravi Dwi Wijayanto (2010) dengan judul “analisis pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2005-2008”. Tulisannya menganalisis tentang pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB),

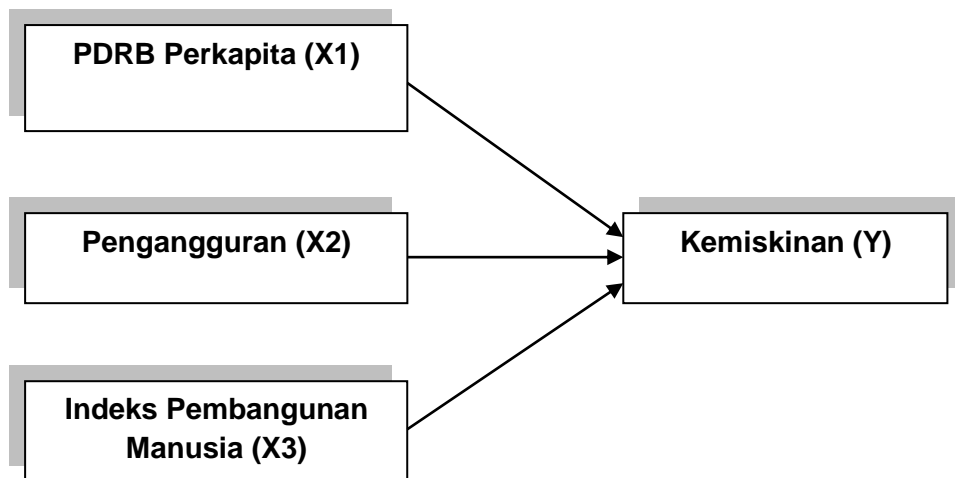
pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah dari tahun 2005-2008. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan panel data yang merupakan kombinasi antara deret waktu (*time-series data*) dan kerat lintang (*cross-section data*). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel PDRB menunjukkan tanda negatif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, variabel pendidikan yang diproksi dengan besarnya tingkat melek huruf menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah sedangkan variabel pengangguran menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Okta Ryan Pranata Yudha dengan judul pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel, data yang digunakan berupa *time series* (tahun 2009-2011) dan *cross section* (33 provinsi di Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

2.4 Kerangka Pikir

Sehubungan dengan pemikiran ini, penulis membuat kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan ruang lingkup penelitian ini sebagaimana tergambar pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



2.5 Hipotesis

Diduga bahwa indeks pembangunan manusia dan pendapatan perkapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan jumlah pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dan data penelitian diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan. Penetapan daerah penelitian ini didasarkan pada pertimbangan untuk memudahkan penulis mengumpulkan data yang diperlukan.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan variabel independen adalah indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data berkala (*time series*) yang bersumber dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan yang terdiri dari data indeks pembangunan manusia (IPM), pendapatan perkapita, pengangguran dan kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan pada periode tahun 1999-2013.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek studi baik itu berupa buku statistik yang ada di BPS, jurnal dan artikel yang masih relevan dengan penelitian ini. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan

mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan obyek studi yang diteliti.

3.5 Metode Analisis

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, maka akan dianalisis dengan menggunakan model statistik regresi linear berganda. Uji statistik regresi linear berganda digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel melalui metode regresi. Dimana regresi linear berganda yaitu regresi linear yang melibatkan lebih dari dua variabel, yaitu satu variabel terikat (Y) dan lebih dari dua variabel bebas (X_1, X_2, X_3). Uji analisis regresi berganda ini digunakan untuk menganalisa hubungan antar variabel-variabel bebas dalam hal ini PDRB Perkapita (X_1), Pengangguran (X_2), dan Indeks pembangunan manusia (X_3), dengan variabel terikatnya dalam hal ini kemiskinan (Y). Sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent.

Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = f (X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots (3.1)$$

Kemudian fungsi di atas ditransformasikan ke dalam model ekonometrika dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana :

Y = Kemiskinan (%)

β_0 = Konstanta

X_1 = Pendapatan Perkapita (Rupiah)

X_2 = Pengangguran (%)

X_3 = Indeks Pembangunan Manusia (%)

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Parameter yang akan ditaksir untuk memperoleh gambaran tentang hubungan setiap variabel bebas dan variabel terikat.

μ = *Error term*

3.6 Uji Statistik

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik di bawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada (Gujarati, 1995).

3.6.1 Uji Signifikansi Parameter (Uji t)

Hal ini dilakukan dengan cara pengujian variabel-variabel independent secara parsial (individu), digunakan untuk mengetahui signifikansi dan pengaruh variabel independent secara individu terhadap variasi terhadap variabel independent lainnya. Disini peneliti menggunakan uji t melalui probabilitas, penjelasannya sebagai berikut: $t\text{-hitung} = \beta_1 SE(\beta_1)$ dimana:

β_1 = nilai koefisien regresi

SE = nilai standar error dari β_1

Dengan menggunakan tingkat keyakinan (*level of significant*) atau α tertentu, $df = n - k$ ($df = \text{degree of freedom}$). Apabila nilai t hitung $>$ t tabel, maka H_0

ditolak, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (Ari Sudarman, 1984).

Hipotesis yang digunakan :

$H_0 : \beta_1 < 0$; berarti variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependent.

$H_1 : \beta_1 > 0$; berarti variabel independent mempengaruhi variabel dependent.

Apabila probabilitas < dari 0.05, maka dapat dikatakan signifikan.

3.6.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi R^2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependent. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar variasi variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independent. Sebaliknya, makin kecil nilai R^2 , maka semakin kecil variasi variabel dependent yang dapat di jelaskan oleh variasi variabel independent. Sifat dari koefisien determinasi adalah :

1. R^2 merupakan besaran yang non negatif.
2. Batasnya adalah ($0 \leq R^2 \leq 1$). (Gujarati, 1995)

Apabila R^2 bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel independent dengan variabel dependent. Semakin besar nilai R^2 maka semakin tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi.

3.6.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hal ini dilakukan dengan cara pengujian terhadap variabel – variabel independent secara bersama-sama yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Disini peneliti melakukan uji

F dengan menggunakan probabilitas, perhitungannya adalah sebagai berikut :

F-hitung = $R^2 / (K - 1)(1 - R^2) / (n - K)$ dimana :

R^2 = Adalah koefisien determinasi.

n = Adalah jumlah sampel (observasi).

K = Adalah banyaknya parameter/koefisien regresi plus constant.

Dengan tingkat keyakinan α tertentu df ($n-k$, $k-1$), jika F hitung > F tabel, maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa uji secara serempak semua variabel independen yang digunakan dapat menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, maka variabel independent secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependent.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, maka variabel independent secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependent.

Apabila probabilitas (F-Statistik) < dari 0,05 , maka dikatakan signifikan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil keputusan dengan menggunakan probabilitas.

3.6.4 Pengujian Asumsi Klasik

Pada prakteknya, beberapa masalah sering muncul pada saat analisis regresi digunakan untuk mengestimasi suatu model dengan sejumlah data. Maka sebelum melakukan interpretasi terhadap hasil regresi dari model yang digunakan, terlebih dulu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik model OLS, sehingga model tersebut layak digunakan. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, pada prinsipnya model regresi linear yang dibangun sebaiknya tidak boleh menyimpang dari asumsi BLUE (Best, Linear, Unbiased, dan Estimator) dalam pengertian lain model yang dibuat harus lolos dari

penyimpangan asumsi adanya serial autokorelasi, normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Terjadinya penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut diatas akan menyebabkan uji statistik (uji t-stat dan F-stat) yang dilakukan menjadi tidak valid dan secara statistik akan mengacaukan kesimpulan yang diperoleh.

3.6.4.1 Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Seperti diketahui bahwa uji F dan uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk mendeteksi hal ini digunakan uji *Jarque-Berra*, uji menggunakan distribusi probabilitas. Dimana jika probabilitasnya lebih besar dari alpha 5 persen maka uji normalitas diterima. Justifikasi lainnya untuk deteksi ini adalah dengan membandingkan nilai J-B hitung dengan χ^2 tabel, apabila J-B hitung $< \chi^2$ tabel maka residual terdistribusi normal. (Gujarati, 1995).

Dapat pula diamati melalui penyebaran data pada sumbu diagonal suatu grafik. Menurut Santoso (2001) ketentuannya sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.4.2 Deteksi Multikolinearitas

Multikolineritas adalah tidak adanya hubungan linear antar variabel independent dalam suatu model regresi. Suatu model regresi dikatakan terkena

multikolinearitas bila terjadi hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dengan membandingkan nilai koefisien determinasi parsial (r^2) dengan nilai koefisien determinasi majemuk (R^2), jika r^2 lebih kecil dari nilai R^2 maka tidak terdapat multikolinearitas. Cara lain untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan menggunakan korelasi antar variabel dimana apabila kurang dari 0.8 maka tidak terdapat multikolinearitas dan sebaliknya apabila hubungan variabel di atas 0.8 maka terdapat multikolinieritas (Gujarati, 1995).

3.6.4.3 Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi digunakan untuk menguji suatu model apakah diantara variabel pengganggu masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. Untuk mengetahui apakah model regresi mengandung autokorelasi dapat digunakan pendekatan Durbin Watson. Menurut Santoso (2001) kriteria autokorelasi ada 3, yaitu

1. $dU < DW < (4-dU)$ maka tidak ada autokorelasi.
2. $dL < DW < dU$ atau $(4-dU) < DW < (4-dL)$ maka tidak dapat disimpulkan.
3. $DW < dL$ atau $DW > (4-dL)$ maka terjadi autokorelasi

3.6.4.4 Deteksi Heterokedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas lebih sering

terjadi pada data *cross section* (Ghozali, 2005). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan Uji White. Secara manual, deteksi ini dilakukan dengan meregresi residual kuadrat (Ut^2) dengan variabel bebas.

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati grafik scatter plot pada output SPSS, dimana menurut Duwi Priyatno (2009) ketentuannya adalah sebagai berikut:

a. Jika titik-titiknya membentuk pola tertentu yang teratur maka terdapat masalah heteroskedastisitas.

b. Jika titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak ada pola yang jelas maka dapat dikatakan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

3.7 Definisi Operasional Variabel

1. Kemiskinan (Y) adalah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1999–2013 yang dinyatakan dalam satuan persen.
2. PDRB Perkapita (X1) adalah angka PDRB suatu wilayah dibagi jumlah penduduk wilayah tersebut dalam satu periode. Pendapatan per kapita menunjukkan pendapatan yang diterima orang perorangan atas kegiatan ekonomi pada suatu wilayah yang diukur dalam harga konstan dinyatakan dalam satuan rupiah.
3. Pengangguran (X2) adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Variabel pengangguran yang digunakan adalah tingkat

pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1999-2013 yang dinyatakan dalam satuan persen.

4. Indeks Pembangunan Manusia (X3) adalah alat ukur yang dapat menunjukkan persentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan mengukur rata-rata dari tiga indikator pembangunan manusia yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli. Data yang digunakan adalah data indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1999-2013 yang dinyatakan dalam satuan persen.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah darat Provinsi Sulawesi Selatan dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak antara 00 12' ~ 80 Lintang Selatan dan 1160 48'~1220 36' Bujur Timur, yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Timur, serta berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah Barat dan Laut Flores di sebelah Timur. Luas wilayah Sulawesi Selatan mencapai 45.764,53 Km2 yang terbagi menjadi 21 kabupaten dan 3 kota dan terdiri dari 304 kecamatan dan 2.953 desa/kelurahan. Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan persentase kemiringan lahan, daerah dengan lahan datar dan landau masing-masing 43% dan 6% dari luas wilayah terdapat di bagian Selatan dan Timur, terutama di Kabupaten Wajo, Bone, Barru, Sidrap, Soppeng, Pangkep, Bulukumba, Jeneponto dan Takalar. Sedangkan daerah bergelombang, berbukit sampai bergunung dengan kemiringan agak curam, curam dan sangat curam, masing-masing 17%, 16% dan 19%, terdapat di bagian Utara, meliputi Kabupaten Tana Toraja dan Pinrang, serta bagian Utara Luwu. Jumlah pulau di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 295 buah terdiri dari pulau yang telah bernama sebanyak 190 buah, dan pulau belum bernama sebanyak 105 buah. Jumlah sungai yang mengalir di Sulawesi Selatan terdapat 67 aliran sungai, terbanyak di Kabupaten Luwu yakni 25 aliran sungai.

Sungai terpanjang di daerah ini yaitu Sungai Saddang dengan panjang 150 km yang melalui Kabupaten Tana Toraja, Enrekang dan Pinrang. Selain

aliran sungai, daerah ini juga memiliki sejumlah danau yaitu Danau Tempe di Kabupaten Wajo dan Danau Sidenreng di Kabupaten Sidrap, serta Danau Matana dan Danau Towuti di Kabupaten Luwu. Disamping memiliki sejumlah sungai dan danau, di daerah ini juga memiliki wilayah pegunungan yakni Gunung Rantemario sebagai gunung tertinggi yakni 3.470 m di atas permukaan laut.

Letak yang strategis ini membuat Sulawesi Selatan menjadi pintu gerbang utama menuju Kawasan Timur Indonesia (KTI). Wilayah yang berada di ujung pulau Sulawesi ini mempunyai satu pelabuhan bertaraf internasional yang berperan dalam distribusi kebutuhan barang dan jasa bagi KTI, serta bandar udara bertaraf internasional serta pangkalan militer bagi pertahanan negara di kawasan timur Indonesia.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan menjadikan daerah ini sebagai penyedia bahan baku bagi industri baik didalam dan luar negeri. Keadaan alam ini menjadi modal penting dalam pembangunan di daerah tersebut, apalagi Sulawesi Selatan berada pada jalur persimpangan dan menjadi pintu gerbang bagi Indonesia timur sehingga berpengaruh terhadap kinerja pembangunan setiap daerah yang kemudian menjadikan daerah tersebut mampu berkembang dengan baik atau malah menjadi yang semakin tertinggal.

4.1.2 Kondisi Demografis

Pada tahun 1999 jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 7.712,593 jiwa dan hingga pada tahun 2013 penduduk Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 8.342.047 jiwa. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu daerah dan jumlah penduduk bisa menjadi suatu penghambat dan pendorong perekonomian. Perkembangan jumlah penduduk yang cepat tidak selalu menjadi penghambat dalam

pembangunan ekonomi jika penduduk tersebut mempunyai kapasitas untuk menyerap dan menghasilkan produksi yang dihasilkan. Perkembangan penduduk Sulawesi Selatan selama tahun 1999-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun	Jumlah (ribu jiwa)
1999	7.712,593
2000	6.936,990
2001	7.006,066
2002	7.060,129
2003	7.280,351
2004	7.379,370
2005	7.494,701
2006	7.629,138
2007	7.700,255
2008	7.805,024
2009	7.908,519
2010	8.034,776
2011	8.115,638
2012	8.190,222
2013	8.342.047

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Menurut hasil survey Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1999-2013 sekitar 8.342.047 jiwa. Jumlah penduduk di Sulawesi Selatan paling sedikit pada tahun 2000 sebesar

6.936.990 dan terjadi peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 8.342.047 jiwa. Daerah yang mengalami penurunan dan peningkatan penduduk disebabkan oleh beberapa faktor-faktor demografi antara lain seperti kematian, kelahiran dan migrasi. Pertambahan penduduk yang relatif besar terjadi di daerah perkotaan beserta kabupaten di sekitarnya. Hal ini adalah wajar, karena ekonomi masyarakat berpusat di daerah perkotaan. Daerah yang mengalami pertumbuhan cukup pesat dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, faktor kesempatan kerja yang lebih luas, melanjutkan pendidikan yang tinggi, sejumlah fasilitas yang lebih memadai khususnya di daerah perkotaan dan berbagai daya tarik lainnya.

4.2 Perkembangan Variabel Penelitian

4.2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan persoalan kemiskinan sebagai fokus utama mereka untuk dituntaskan. Tujuan penanggulangan kemiskinan antara lain, menjamin perlindungan dan pemenuhan hak dasar penduduk dan rumah tangga miskin, mempercepat penurunan jumlah penduduk dan rumah tangga miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjamin konsistensi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, pelayanan akses perumahan dan pemukiman dan/atau penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha. Berikut ini adalah tabel jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1999-2013**

Tahun	Jumlah penduduk miskin (juta jiwa)	Persentase (%)
1999	1.462,00	18,32
2000	1.198,00	15,44
2001	1.296,30	16,50
2002	1.309,23	15,88
2003	1.301,8	15,85
2004	1.241,5	14,90
2005	1.280,6	14,98
2006	1.112,0	14,57
2007	1.083,4	14,11
2008	1.031,7	13,34
2009	963,6	12,31
2010	913,4	11,61
2011	835,5	10,29
2012	825,79	10,11
2013	863,2	10,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 1999 hingga tahun 2013. Dapat dilihat jumlah penduduk miskin tahun 1999 sebesar 1.462,0 jiwa dengan persentase 18,32%, pada tahun 2000 sebesar 1.198,0 jiwa dengan persentase 15,44% dan pada tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 1.296,3 jiwa dengan persentase 16,50% pada

tahun 2002 naik sebesar 1.309,2 jiwa dan pada tahun 2003 mengalami sedikit penurunan sebesar 1.301,8 dengan persentase 15,85% dan pada tahun 2004 sebesar 1.241,5 hingga tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 1.280,6 kemudian pada tahun 2006 sebesar 1.112,0 dan pada tahun 2007 sebesar 1.083,4 dan kemudian tahun 2008 sebesar 1.031,7 jiwa dan tahun 2009 sebesar 963,6 jiwa dan pada tahun 2010 sebesar 913,4 kemudian pada tahun 2011 sebesar 835,5 dan selanjutnya pada tahun 2012 sebesar 825,7 jiwa dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2013 sebesar 863,2 jiwa dengan persentase 10,32 %.

Penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk meningkat lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk miskin dan tidak terlepas dari adanya program kemiskinan seperti Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan Biaya Operasional Sekolah (BOS).

4.2.2 Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan

Pendapatan regional per kapita atau PDRB perkapita sering digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemajuan atau tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Dengan berkembangnya perekonomian tentunya berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk. PDRB perkapita diperoleh dengan cara nilai produk domestik regional bruto dibagi dengan jumlah penduduk.

Pengukuran PDRB sangat diperlukan dalam kebijakan makroekonomi. Pengukuran tersebut dapat digunakan untuk menghadapi berbagai masalah sentral yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, siklus usaha, hubungan antara kegiatan ekonomi dan pengangguran. PDRB juga menggambarkan aktivitas perekonomian suatu daerah. Perekonomian secara umum dikatakan

membaik jika terjadi peningkatan PDRB. Didalam perhitungan PDRB terdapat unsur harga yang mempengaruhi besarnya nilai PDRB. Ukuran kemakmuran ekonomi yang lebih baik menghitung output barang dan jasa perekonomian tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. Dengan asumsi harga konstan, maka nilai barang yang diproduksi dengan pengeluaran agregat akan bergerak kearah yang sama. Berikut ini adalah jumlah pendapatan perkapita atas dasar harga konstan Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 4.3 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan
Provinsi Sulawesi Selatan 1999-2013

Tahun	Jumlah PDRB (dalam juta Rp)
1999	26.941.764
2000	28.258.971
2001	29.735.720
2002	30.948.819
2003	32.627.380
2004	34.345.081
2005	36.424.018
2006	38.867.679
2007	41.332.426
2008	44.549.824
2009	47.326.078
2010	51.199.899
2011	55.098.741
2012	59.718.497
2013	64.283.430

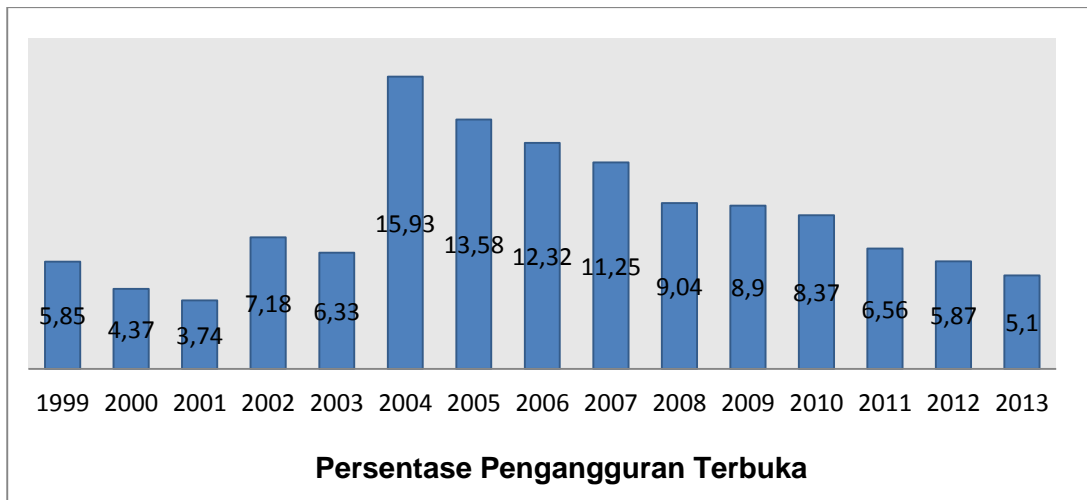
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan data pada tabel diatas dari tahun 1999 hingga tahun 2013 menunjukkan bahwa PDRB perkapita setiap tahun terus mengalami peningkatan, PDRB perkapita paling rendah terjadi pada tahun 1999 yang hanya sebesar Rp 26.941.764 hal ini disebabkan pasca krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi minus, kurs rupiah melemah terhadap mata uang asing akibatnya berpengaruh ke sektor lainnya seperti berkurangnya investasi dan banyak industri-industri yang bangkrut, hal tersebut memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan PDRB perkapita yang paling tinggi dicapai pada tahun 2013 sebesar Rp64.283.430.

4.2.3 Perkembangan Pengangguran Provinsi Sulawesi Selatan

Pengangguran adalah salah satu faktor yang penting dan menjadi perhatian dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran sangat erat hubungannya dengan laju pertumbuhan penduduk. Dengan laju pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja) yang kemudian besarnya angkatan kerja ini dapat menekan ketersediaan lapangan kerja dipasar kerja. Sedangkan angkatan kerja sendiri terdiri dari dua komponen yaitu orang yang menganggur dan orang yang bekerja. Apabila mereka tidak bekerja konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, kondisi seperti ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah kemiskinan yang ada. Berikut ini adalah grafik perkembangan pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1999-2013.

Gambar 4.1 Grafik Pengangguran Terbuka
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1999-2013



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan grafik 4.5 menunjukkan bahwa persentase pengangguran terbuka Sulawesi Selatan dalam periode 1999-2013 mengalami fluktuasi. Keadaan itu digambarkan pada tahun 1999 sebesar 5,85% dan pada tahun 2000 sebesar 4,37% kemudian pada tahun 2001 sebesar 3,74% dan pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 7,18% dan tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 6,33% dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan paling besar hingga 15,93% dan tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 13,58% dan tahun 2006 sedikit penurunan sebesar 12,32% kemudian tahun 2007 sebesar 11,25% dan tahun 2008 sebesar 9,04% kemudian tahun 2009 sebesar 8,90% dan tahun 2010 sebesar 8,37% dan tahun 2011 sebesar 6,56% kemudian pada tahun 2012 sebesar 5,87% hingga tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan hingga sebesar 5,1%.

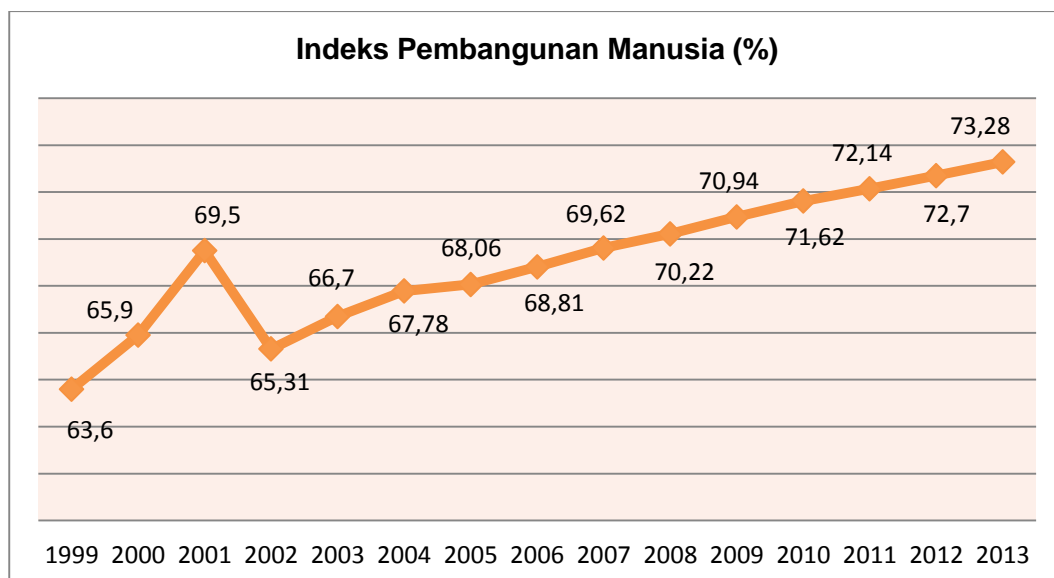
Melalui tingkat pengangguran kita dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat serta tingkat distribusi pendapatan. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan karena rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja.

4.2.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya guna memperoleh pendapatan untuk mencapai hidup layak, peningkatan derajat kesehatan agar meningkat usia hidup panjang dan sehat dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis) dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi. Berikut data indeks pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 4.2 Grafik Indeks Pembangunan Manusia

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1999-2013



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan gambar 4.2 pada grafik indeks pembangunan manusia di atas menunjukkan bahwa pada tahun 1999 persentase indeks pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 63,60% kemudian pada tahun

2000 meningkat menjadi 65,90% dan tahun 2001 sebesar 69,50% lalu pada tahun 2002 menurun menjadi 65,31 selanjutnya pada tahun 2003 sedikit mengalami peningkatan menjadi 66,70% kemudian tahun 2004 sebesar 67,78% dan tahun 2005 meningkat menjadi 68,06% dan pada tahun 2006 sebesar 68,81% lalu pada tahun 2007 persentase meningkat menjadi 69,62% dan tahun 2008 70,22% lalu pada tahun 2009 sebesar 70,94 dan kemudian pada tahun 2010 sedikit meningkat menjadi 71,62% lalu tahun 2011 sebesar 72,14% dan tahun 2012 sebesar 72,70% kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 73,28%. Indeks pembangunan manusia terus mengalami peningkatan, hal ini tidak terlepas dari kinerja pemerintah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Secara umum, kenaikan angka indeks pembangunan manusia diharapkan mampu mewakili peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga menghasilkan manusia (SDM) yang produktif, yaitu tenaga manusia yang sehat, berpendidikan dan terampil khususnya pada kalangan bawah.

4.3 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis statistik dan estimasi model regresi dengan menggunakan data time series selama periode tahun 1999-2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu persamaan regresi yang melibatkan 2 (dua) variabel atau lebih (Gujarati, 2003). Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel dependen terhadap variabel independen. Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS-16.0 yang membantu dalam pengujian model, mencari nilai koefisien dari tiap-tiap variabel, serta pengujian hipotesis secara parsial maupun bersama-sama.

4.3.1 Uji Statistik

4.3.1.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R^2 terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dari tabel nilai koefisien regresi diatas, dapat diketahui bahwa nilai R Square (R^2) adalah 0,945. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 94,5 persen tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh PDRB Perkapita (X1), Pengangguran (X2) dan Indeks Pembangunan Manusia (X3), sedangkan sisanya sebesar 5,5 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian. Dengan demikian, hubungan variabel-variabel bisa dikatakan kuat.

4.3.1.2 Uji F (Simultan)

Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut H_0 diterima ($F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$) artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. H_1 diterima ($F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$) artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Pengaruh PDRB perkapita (X1), pengangguran terbuka (X2) dan indeks pembangunan manusia (X3) terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Dengan menggunakan taraf keyakinan 95% ($\alpha=0,05$) degree of freedom ($df_1 = k-1 = 4-1 = 3$) dan ($df_2 = n-k = 10-4 = 6$) diperoleh F-tabel sebesar 3,59.

Dengan melihat hasil regresi pada tabel 4.5 di bawah ini diperoleh F hitung = 63.476 sedangkan F tabel = 3,59, dengan demikian ketiga variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan.

Tabel 4.4 Tabel Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	82.579	3	27.526	63.476	.000 ^a
	Residual	4.770	11	.434		
	Total	87.349	14			

a. Predictors: (Constant), IPM, Persentase_Pengangguran_Terbuka, pdrb_perkapita

b. Dependent Variable: kemiskinan

Pada tabel 4.4 menunjukkan angka hasil uji F dapat dilihat F hitung = 63.476, sedangkan dari F tabel dengan $df_1=3$ dan $df_2=11$ maka didapatkan F tabel = 3,59. Oleh karena itu F hitung $63.476 > F$ tabel 3,59 maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, dengan tingkat signifikansi 0,000 artinya PDRB perkapita, pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan kata lain, variabel-variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

4.3.1.3 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik-t)

Uji signifikansi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variable independen dikatakan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen bila nilai t-statistik lebih > nilai t-tabel. Pengaruh PDRB perkapita (X_1), pengangguran terbuka (X_2) dan indeks pembangunan manusia (X_3) terhadap tingkat kemiskinan (Y) pada taraf

nyata α digunakan adalah 0,05 (5%) dan degree of freedom ($df = n - k = 15 - 4 = 11$) diperoleh t-tabel sebesar 1,795. Pada tabel berikut dapat kita lihat hasil uji-t tersebut.

Tabel 4.5 Tabel Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	156.257	19.459		8.030	.000					
pdrb_perkapita	-7.779	1.698	-.871	-4.581	.001	-.970	-.810	-.323	.137	7.281
Persentase_Pengangguran_Terbuka	.030	.050	.043	.598	.562	.057	.178	.042	.984	1.016
IPM	-.093	.167	-.107	-.560	.587	-.917	-.166	-.039	.137	7.304

a. Dependent Variable:
kemiskinan

Berdasarkan hasil olah data pada tabel diatas dengan menggunakan SPSS, maka diperoleh pemaparan sebagai berikut :

1. Variabel PDRB Perkapita (X1) mendapatkan uji t = -4,581 dengan signifikansi 0,001. Koefisien hasil uji t dari PDRB Perkapita menunjukkan tingkat sigifikansi 0,001 yaitu lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 (<5%). Untuk t hitung yang dihasilkan adalah sebesar 4,581 sedangkan t-tabelnya adalah 1,795. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($-4,581 < 1,795$), H_1 ditolak dan H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

2. Variabel Pengangguran Terbuka (X2) mendapatkan uji $t = 0,598$ dengan signifikansi $0,562$. Koefisien hasil uji t dari pengangguran terbuka menunjukkan tingkat signifikansi $0,562$ yaitu lebih besar dibandingkan dengan $0,05 (>5\%)$. Untuk t hitung yang dihasilkan adalah sebesar $0,598$ sedangkan t tabelnya adalah $1,795$. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,598 < 1,795$) artinya H_1 ditolak dan H_0 diterima, maka pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X3) berdasarkan hasil data didapatkan uji t sebesar $-0,560$ dengan tingkat signifikansi $0,587$. Koefisien hasil uji t dari indeks pembangunan manusia menunjukkan tingkat signifikansi $0,587$ yang mana lebih besar dibandingkan dengan $0,05 (>5\%)$. Untuk t hitung yang dihasilkan adalah sebesar $-0,560$ sedangkan t tabelnya sebesar $1,795$. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($-0,560 < 1,795$), H_1 ditolak dan H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang dapat dipakai untuk normalitas antara lain: analisis grafik dan analisis statistik. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

analisis grafik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal (menyerupai lonceng), regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan hasil statistik Uji Normalitas Pada **LAMPIRAN (Diagram 2. Uji Normalitas)** menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal karena bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderungimbang dan kurva berbentuk menyerupai lonceng (mendekati pola distribusi normal).

Kemudian berdasarkan hasil Uji Normalitas Pada **LAMPIRAN (Diagram 2. Uji Normalitas)** dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas karena data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran data searah mengikuti garis diagonal tersebut.

4.3.2.2 Uji Multikolineritas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen diantara satu dengan yang lainnya. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Deteksi multikolineritas pada suatu model dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu jika *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan jika

Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas (Agung, 2007).

Tabel 4.6 Tabel Uji Multikolineritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	156.257	19.459		8.030	.000					
	pdrb_perkapita	-7.779	1.698	-.871	-4.581	.001	-.970	-.810	-.323	.137	7.281
	Persentase_Pengangguran_Terbuka	.030	.050	.043	.598	.562	.057	.178	.042	.984	1.016
	IPM	-.093	.167	-.107	-.560	.587	-.917	-.166	-.039	.137	7.304

a. Dependent Variable: kemiskinan

Dapat kita lihat bahwa nilai *tolerance* dan *VIP* dari variabel PDRB perkapita adalah sebesar 0,137 dan 7,281, untuk variabel pengangguran terbuka adalah sebesar 0,984 dan 1,016 dan untuk variabel indeks pembangunan manusia adalah sebesar 0,137 dan 7,304. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam model ini tidak terdapat masalah multikolineritas antara beberapa variabel bebas karena nilai *tolerance* berada dibawah 1 dan nilai *VIP* dibawah angka 10.

4.3.2.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu (apabila datanya *time series*) atau korelasi antara tempat berdekatan (apabila *cross*

sectional). Adapun uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik ini adalah uji Durbin Watson (D-W stat).

$1,70 < DW < 2,30$ maka tidak ada autokorelasi.

$0,51 < DW < 1,70$ atau $2,31 < DW < 3,49$ maka tidak dapat disimpulkan.

$DW < 0,51$ atau $DW > 3,49$ maka terjadi autokorelasi.

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS Uji Autokorelasi pada **LAMPIRAN (Tabel 2. Uji Autokorelasi)**, dapat diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* pada *Model Summary* adalah sebesar 2.507. Oleh karena itu, maka hal ini berarti tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

4.3.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian untuk melihat ada atau tidaknya Heteroskedistisitas dapat dilakukan dengan melihat *scatter plot* antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika titik-titik pada *scatter plot* tersebut membentuk pola tertentu yang teratur (misal bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka dapat diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan *scatter plot* pada **LAMPIRAN (Diagram 1. Uji Heterokedastisitas)** terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas.

4.3.3 Uji Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah diperoleh, maka hasil tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7 Hasil Regresi Linear Berganda Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	156.257	19.459		8.030	.000					
pdrb_perkapita	-7.779	1.698	-.871	-4.581	.001	-.970	-.810	-.323	.137	7.281
Persentase_Pengangguran_Terbuka	.030	.050	.043	.598	.562	.057	.178	.042	.984	1.016
IPM	-.093	.167	-.107	-.560	.587	-.917	-.166	-.039	.137	7.304

a. Dependent Variable:
kemiskinan

Persamaan linear regresi berganda antara PDRB perkapita (X1), pengangguran (X2) dan indeks pembangunan manusia (X3) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan periode 1999-2013. Persamaan regresi berganda dapat dilakukan dengan menginterpretasikan angka-angka yang ada didalam *Unstandardized Coefficient Beta* pada tabel 4.7 diatas. Dengan memperhatikan angka yang berada pada kolom *Unstandardized*

Coefficient khususnya kolom B, maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 156,257 - 7,779 X_1 + 0,030 X_2 - 0,093 + \mu \dots\dots\dots (3.3)$$

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh PDRB Perkapita Terhadap Kemiskinan

Dari hasil estimasi menjelaskan bahwa PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Artinya apabila terjadi kenaikan pada PDRB perkapita maka tingkat kemiskinan akan turun, dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis.

Pendapatan perkapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, hal ini berarti semakin tinggi PDRB perkapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Menurut Kuznet, pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Selanjutnya menurut Hermanto S dan Dwi W (2006) mengungkapkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat maka kemiskinan di suatu daerah dapat di tekan jumlahnya. Yang mana kemiskinan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Deni Tisna (2008) menyatakan bahwa PDRB perkapita sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

4.4.2 Pengaruh Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya kenaikan tingkat pengangguran terbuka tidak menaikkan angka kemiskinan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini.

Tidak semua orang yang sementara menganggur itu selalu miskin. Karena seperti halnya penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka ada beberapa macam penganggur, yaitu mereka yang mencari kerja, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Diantara empat kategori pengangguran terbuka diatas bahwa sebagian diantaranya ada yang masuk dalam sektor informal, dan ada juga yang mempunyai pekerjaan dengan jam kerja kurang dari yang ditentukan.

Selain itu pastilah juga ada yang berusaha atau mempersiapkan usaha sendiri, ada juga yang sedang menunggu mulainya bekerja, ada juga yang mempunyai pekerjaan paruh waktu (*part time*), namun dengan penghasilan melebihi orang bekerja secara normal dan yang mana semua golongan tersebut masuk dalam kategori pengangguran terbuka.

Menurut Godfrey (1993) yaitu bahwa kemiskinan mungkin tidak selalu berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan. Selain itu juga diperkuat dengan pendapat Lincoln (1997) yang menyatakan bahwa salah jika beranggapan setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin,

sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka.

4.4.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan hasil koefisien regresi -0,093 dan signifikansi 0,587.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Menurut Lanjouw (2001), pembangunan manusia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk yang tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu meningkatkan produktivitas dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Apriliyah S. Napitupulu (2007) mengatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel PDRB Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan apabila terjadi peningkatan PDRB Perkapita maka tingkat kemiskinan akan turun, dengan demikian hipotesis terbukti.
2. Variabel Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya apabila angka pengangguran naik maka tidak akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan, dengan demikian hipotesis tidak terbukti. Hal ini diduga karena kesalahan pemilihan variabel.
3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila Indeks Pembangunan Manusia naik maka tingkat kemiskinan akan turun, dengan demikian hipotesis terbukti.
4. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.945, yang berarti bahwa variabel-variabel bebas yaitu PDRB perkapita, pengangguran dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan sebesar 94,5 persen sedangkan sisanya sebesar 5,5 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi.

5. Berdasarkan perhitungan dengan uji F diketahui bahwa $F\text{-hitung}$ sebesar $(63,47) > F\text{-tabel} (3,59)$, sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dengan kata lain, PDRB perkapita, pengangguran dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa masukan, yaitu :

1. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hendaknya memperhatikan masyarakat dengan pemberdayaan dan peningkatan produktivitas yang dapat memacu terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga dapat berpengaruh terhadap tabungan dan investasi. Investasi yang tinggi dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
2. Oleh karena hasil penelitian menunjukkan PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan maka pemerintah diharapkan memberikan perhatian terhadap peningkatan pendapatan daerah dan perbaikan distribusi pendapatan. Hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
3. Berdasarkan hasil penelitian pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, tetapi dengan hasil tersebut diharapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lebih menggerakkan sektor informal. Karena pengangguran dalam penelitian ini menggunakan data pengangguran terbuka, yang mana di dalamnya terdapat golongan masyarakat yang sedang dalam tahap menyiapkan usaha atau mendapat

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja yang dimasukkan dalam golongan pengangguran. Sehingga pentingnya peningkatan sektor informal untuk menekan kemiskinan. Karena sektor informal merupakan salah satu solusi masalah dalam mengatasi pengangguran.

4. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih terbatas karena hanya melihat pengaruh variabel PDRB perkapita, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karenanya diperlukan studi lanjutan yang lebih mendalam dengan data dan metode yang lebih lengkap sehingga dapat melengkapi hasil penelitian yang telah ada dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dalam hal penekanan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim. 2009, *Mereduksi Kemiskinan : Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia*, Nala Cipta Litera: Makassar
- _____. 2012. *Penanganan Kemiskinan di Sulawesi Selatan : Pendekatan dan Agenda Kebijakan*.
- Apriliyah, S Naputipulu. 2007. *Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Skripsi: e-repository Usu
- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, Penerbit BP STIEYKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Data dan Informasi Kemiskinan 2008*. Jakarta: BadanPusat Statistik
- _____. 2007. *Jakarta – Indonesia dan Informasi Kemiskinan*. Sul-Sel: BadanPusatStatistik
- _____. 2001. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Sul-Sel: BadanPusatStatistik
- Bappeda. *Kajian Penduduk Miskin Menurut Sektor Ekonomi*. Sul-Sel : BadanPusatStatistik
- Booth, A. dan R,M, Sundrum. 1987. *Distribusi Pendapatan, dalam A. Booth dan P.McCawley (Eds.) Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES
- Criswardani, Suryawati. 2005. *Memahami Kemiskinan SecaraMultidimensional*. http://www.jmpkne.net/Volume_8/Vol_08_No_03_2005.pdf.

- Deny Tisna A., 2008. *Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004*. Kumpulan Skripsi UNDIP: Semarang.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti. 2008, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Online at http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/PROS_2008_MAK3.pdf.
- Kuncoro, Mudrajat. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. (2nd ed.). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2001, *Metode Kuantitatif*, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Lanjouw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow, 2001. *Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?*. World Bank Working Paper No. 2739. Washington D.C.: World Bank. Diakses dari: <http://papers.ssrn.com>
- M. Muh. Nasir, Saichudin dan Maulizar. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo*. Jurnal Eksekutif. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. Lipi. Jakarta.
- Octaviani, Dian 2001, *Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia : Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke*, Media Ekonomi, Hal. 100-118, Vol. 7, No. 8.

- Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo, 2003, *Produksi DomestikBruto, Harga, dan Kemiskinan*, Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Hal. 191 - 324, Vol. 51, No. 3
- Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga, 2009. *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Indonesia*. Ejournal Economics
- Sri Rejeki, Dwi Prawani. 2006. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program P2KP*. Universitas Diponegoro
- Sukirno, Sadono. 1999. *Makroekonomi Modern*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2000. *Makro Ekonomi Modern*, Penerbit PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Sukmaraga, Prima. 2011. *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per Kapita, Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin*. Universitas Diponegoro.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Perekonomian Indonesia Teori dan Temua Empiris*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerjemah: Haris Munandar. Erlangga: Jakarta.

Todaro, Michael P. dan Stephen C, Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan*. Erlangga: Jakarta.

United Nations Development Programme. 1993. *The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*. [www. google.com](http://www.google.com).

www.bps.go.id

www.wikipedia.com

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN 1

Data jumlah penduduk miskin, PDRB perkapita, Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1999-2013

Tahun	Y	X1	X2	X3
1999	7712593	26.941.764	5,85	63,60
2000	6936990	28.258.971	4,37	65,90
2001	7006066	29.735.720	3,74	69,50
2002	7060129	30.948.819	7,18	65,31
2003	7280351	32.627.380	6,33	66,70
2004	7379370	34.345.081	15,93	67,78
2005	7494701	36.424.018	13,58	68,06
2006	7629138	38.867.679	12,32	68,81
2007	7700255	41.332.426	11,25	69,62
2008	7805024	44.549.824	9,04	70,22
2009	7908519	47.326.078	8,9	70,94
2010	8034776	51.199.899	8,37	71,62
2011	8115638	55.098.741	6,56	72,14
2012	8190222	59.718.497	5,87	72,70
2013	8342047	64.283.430	5,1	73,28

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov.Sulawesi Selatan

Keterangan :

Y : Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)

X1 : PDRB perkapita (rupiah)

X2 : Pengangguran Terbuka (%)

X3 : Indeks Pembangunan Manusia (%)

LAMPIRAN 2

**Hasil Ln Data Jumlah Penduduk Miskin, PDRB perkapita, Pengangguran
Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 1999-2013**

Tahun	(Y) Kemiskinan (%)	(X1) PDRB Perkapita (Ln)	(X2) Pengangguran Terbuka (%)	(X1) IPM (%)
1999	18,32	17,11	5,85	63,60
2000	15,44	17,15	4,37	65,90
2001	16,50	17,20	3,74	69,50
2002	15,88	17,24	7,18	65,31
2003	15,85	17,30	6,33	66,70
2004	14,90	17,35	15,93	67,78
2005	14,98	17,41	13,58	68,06
2006	14,57	17,47	12,32	68,81
2007	14,11	17,53	11,25	69,62
2008	13,34	17,61	9,04	70,22
2009	12,31	17,67	8,9	70,94
2010	11,61	17,75	8,37	71,62
2011	10,29	17,82	6,56	72,14
2012	10,11	17,90	5,87	72,70
2013	10,32	17,978	5,1	73,28

LAMPIRAN 3

TABEL 1 UJI MULTIKOLINERITAS

Coefficients ^a											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	156.257	19.459		8.030	.000					
	pdrb_perkapita	-7.779	1.698	-.871	-4.581	.001	-.970	-.810	-.323	.137	7.281
	Persentase_Pengangguran_Terbuka	.030	.050	.043	.598	.562	.057	.178	.042	.984	1.016
	IPM	-.093	.167	-.107	-.560	.587	-.917	-.166	-.039	.137	7.304

a. Dependent Variable: kemiskinan

TABEL 2 UJI AUTOKORELASI

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.972 ^a	.945	.930	.659	.945	63.476	3	11	.000	2.507

a. Predictors: (Constant), IPM, Persentase_Pengangguran_Terbuka, pdrb_perkapita

b. Dependent Variable: kemiskinan

DIAGRAM 1 UJI HETEROKEDASTISITAS

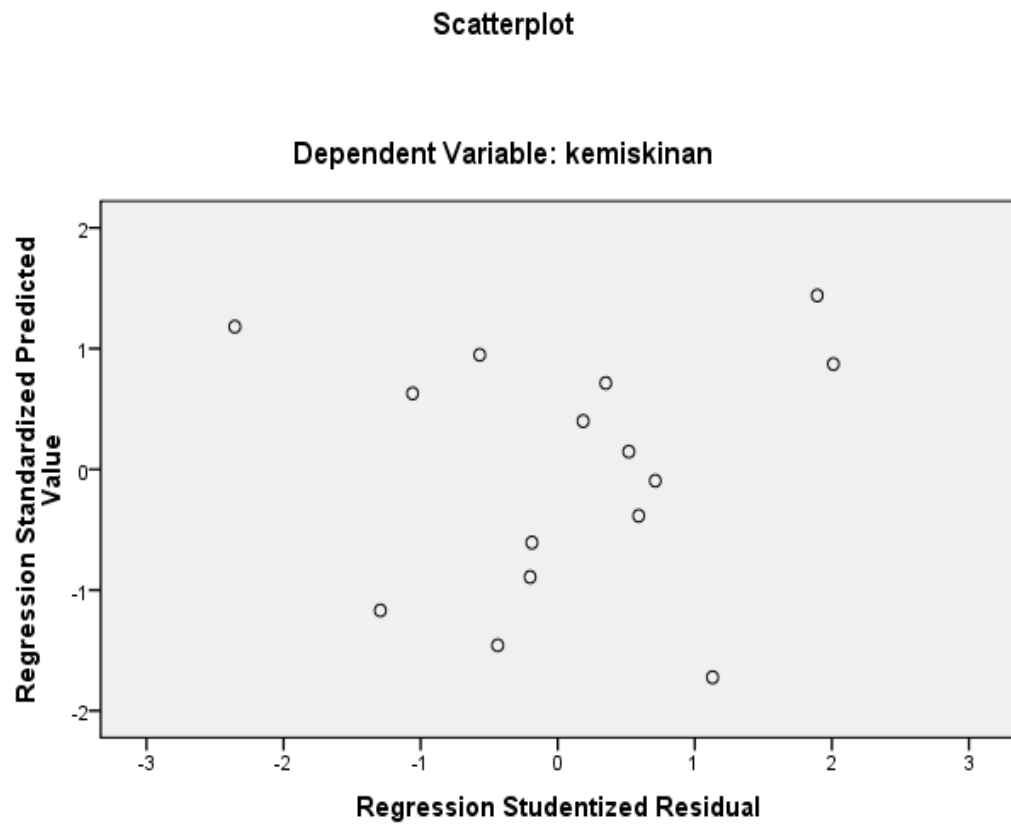


DIAGRAM 2 UJI NORMALITAS

Histogram

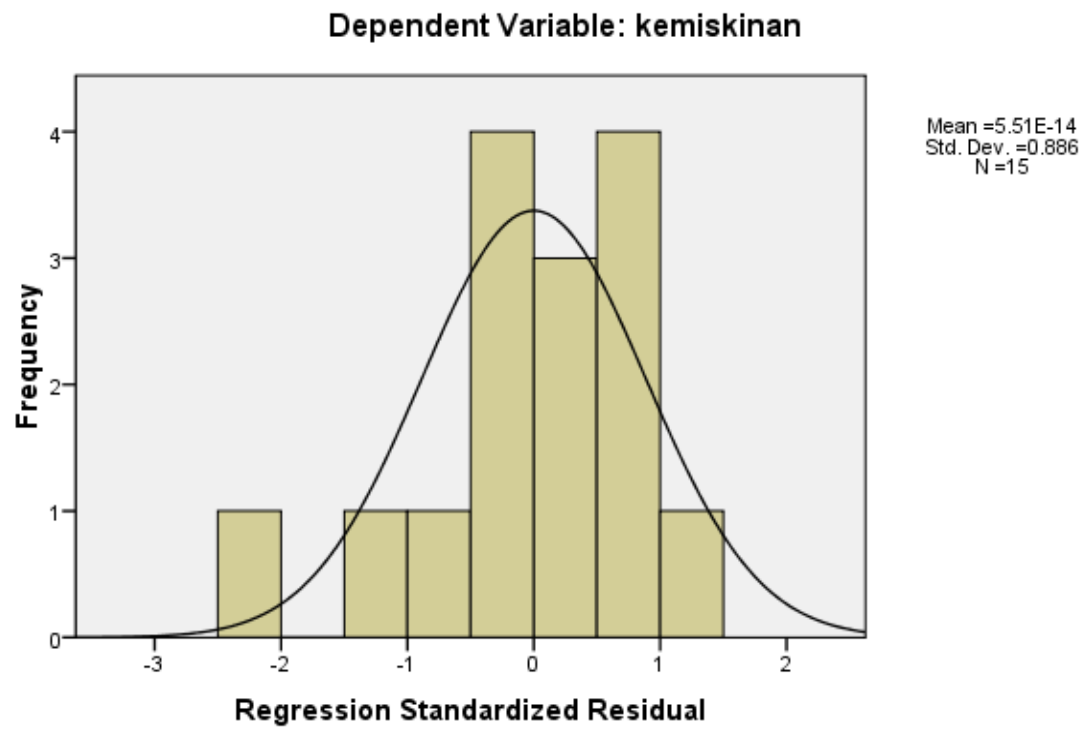
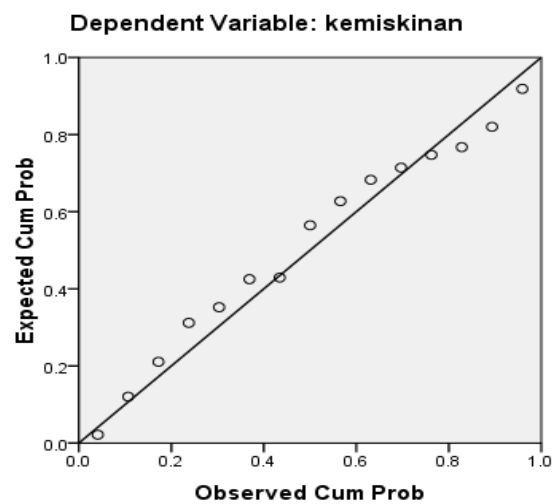


DIAGRAM 3

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual





BIODATA

Identitas Diri :

Nama : Satriani S
Tempat/Tanggal Lahir : Palanro, 6 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Btn Antara Blok A8 No 4
Nomor HP : 082293497873
Alamat Email : aniimacca@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK Darma Wanita
- SD Inpres Palanro
- SMP Negeri 3 Mallusetasi
- SMA Negeri 1 Mallusetasi

Makassar, 7 Juni 2016

Satriani S